

Wagub Ariza Jamin Pengelolaan JIS Dilakukan Secara Transparan

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjamin, pengelolaan operasional Stadion Jakarta International Stadium (JIS) oleh manajemen PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berlangsung transparan. "Prinsipnya kami akan urus, kelola secara baik, profesional, dan transparan," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (29/6).

Riza optimistis badan usaha milik daerah (BUMD) DKI tersebut mampu mengelola JIS secara profesional dan transparan. PT Jakpro, lanjut dia, sudah menginventarisasi biaya perawatan JIS termasuk sumber pembiayaan tersebut.

"Memang JIS ini kan biayanya perawatan yang tidak murah, nanti dari Jakpro juga sudah menghitung berapa biayanya dan sumber pembiayaannya dari mana."

Riza pun mempersilakan masyarakat untuk ikut melakukan audit dan pengawasan atas pengelolaan stadion dengan kapasitas sekitar 82 ribu kursi itu.

"Silakan melakukan pengecekan, pengawasan, audit sekalipun saya kira tidak ada masalah karena semuanya

dilakukan secara transparan dan terbuka," ucap Riza.

Dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI, Direktur Utama Jakpro, Widi Amanasto menjelaskan biaya operasional dan perawatan JIS diperkirakan mencapai hingga Rp 60 miliar per tahun. Biaya tersebut dialokasikan untuk kebersihan dan perawatan, keamanan, peralatan mesin, pergantian lampu, utilitas, hingga asuransi.

Sementara itu, biaya penyusutan aset atau depresiasi per tahun diperkirakan mencapai hingga Rp 150 miliar dengan periode 30 tahun.

Adapun salah satu pendapatan yang diharapkan menutup biaya operasional di antaranya bisnis lapangan latihan dan stadion utama.

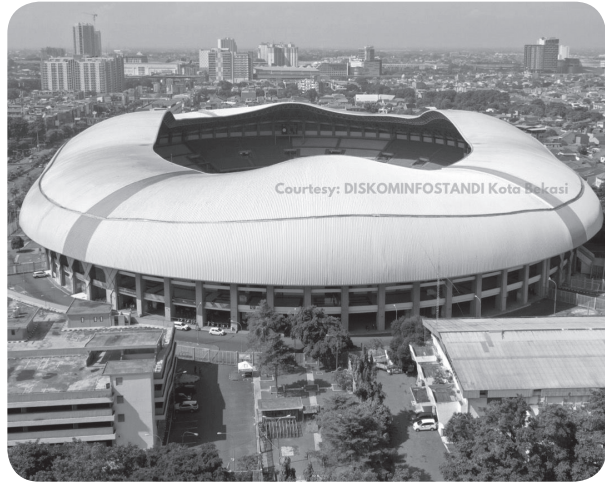
Saat ini, stadion yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara itu sedang tahap penyempurnaan meski sudah dapat digunakan.

Awalnya JIS akan diresmikan saat puncak HUT DKI pada Sabtu (25/6) namun batal dilakukan dengan alasan yang tidak dijelaskan. Rencananya, JIS diresmikan pada Juli 2022.

● yan

Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi Siap Dijadikan Venue Ajang Nasional dan Internasional

FOTO:HUMAS PEMKOT BEKASI



Stadion Patriot Candrabhaga, kebanggaan masyarakat Kota Bekasi.

KOTA BEKASI (IM) - Stadion Patriot Candrabhaga yang berada di jalan Jend Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat, telah resmi dipilih dan akan digunakan dalam waktu dekat ini tepatnya di bulan Juli 2022 untuk event Tim Nasional Indonesia AFF U-19 2022 dalam menghadapi tim-tim raksasa se-Asia Tenggara.

Stadion yang menjadi homebase dari Club Persipasi Kota Bekasi itu, memiliki kapasitas kurang lebih 35.000 penonton, bertaraf internasional dan saat ini sedang banyak dilirik untuk menjadi venue event-event besar seperti AFF, AFC dan menurut rencana juga Piala Dunia U-20 2023.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, Ahmad Zarkasih dalam rilis yang diterima, Rabu (29/6) mengatakan, stadion kebanggaan Kota Bekasi itu akan dijadikan sebagai venue untuk beberapa kejuaraan seperti piala AFF

U-19 2022, AFC Cup 2022 sampai dengan Piala Dunia U-20 2023.

"Kami tentunya sangat senang dan bangga apabila Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi dipilih menjadi tempat ajang bergengsi nasional dan internasional. Ini juga bisa menjadi ajang promosi meningkatkan citra positif Kota Bekasi di mata Indonesia serta dapat meningkatkan PAD Kota Bekasi," ujar Zarkasih.

"Meskipun beberapa aspek penting sudah siap digunakan, masih ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi. Kita terus berkoordinasi dengan pihak PSSI apa saja yang harus dipenuhi ataupun syarat-syarat pertandingan," ucapnya.

Dispora Kota Bekasi juga bekerjasama dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder terkait dalam hal persiapan event besar yang nantinya akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga. ● mdl

ATURANNYA SAJA MALAH GAK TAHU

Warga Bekasi Tolak Beli BBM Pakai MyPertamina

JAKARTA (IM) - Rencana Pertamina untuk mengaktifkan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti pertalite dan solar melalui aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli 2022, terus mendapat protes masyarakat.

Salah satunya, Andrian (24), warga Bekasi. Bahkan, pengendara motor ini belum mengetahui adanya kebijakan tersebut.

"Pakai aplikasi beli Pertalite, baru tahu saya," ujar Andrian, Rabu (29/6).

Ia menyebut, bila tetap dilakukan sosialisasi tersebut, para pengguna sepeda motor untuk mengisi bensin jauh lebih sulit. "Gak bagus lah bikin ribet, karena kan gak boleh pakai hape di pom bensin, pakai aplikasi segala," keluh Andrian.

Andrian yang bekerja sebagai pengemudi ojek online (Ojol), menyebut bila ia lebih suka untuk melakukan antrean seperti biasa, meski kadang harus menunggu lama dan panjang antrean.

"Biasa aja, ngantre, ya tradisional ngantre," ungkapnya.

Meski belum tahu terha-

dap mekanisme pakai aplikasi MyPertamina untuk mengisi pertalite, namun ia menduga masyarakat nanti akan melakukan booking, dan hal itu dikatakan jauh lebih sulit.

Sementara itu, Pengendara sepeda motor lainnya, Gufron (21), mengaku setuju bila hal itu diterapkan.

Menurutnya, usulan tersebut membuat pengendara akan lebih praktis mengisi bahan bakar pertalite.

"Informasi awalnya sih saya belum tahu, tapi adanya rencana ini saya setuju aja. Biar lebih praktis," ujar Gufron.

Gufron yang juga terbiasa untuk mengantre, tak mempersalahkan agar hal tersebut diterapkan.

Ia mengaku telah siap terhadap adanya membeli pertalite pakai aplikasi.

Sebagai pekerja di salah satu minimarket di Bekasi, ia setiap hari membeli produk pertalite di kisaran Rp20 hingga Rp50 ribu.

"Ya tergantung masyarakat sih enak ya gimana, (kalau) saya sudah siap sih untuk gunain aplikasi," pungkasnya.

● yan

4 | Metropolis

FOTO:ANT



MENPORA TINJAU KESIAPAN

VENUE FIBA ASIA CUP 2022
Menpora Zainudin Amali (tengah) berbincang dengan sejumlah official Peratuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) saat meninjau kesiapan venue bola basket di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (29/6). Kunjungan Menpora tersebut guna mengecek kesiapan venue sebagai tuan rumah dan meninjau pelatnas Timnas Basket yang akan mengikuti FIBA Asia Cup 2022 pada 12-24 Juli 2022 mendatang.

SOAL NASIB KARYAWAN HOLYWINGS USAI DISEGEL

Wagub DKI: Kita Carikan Solusi

Karyawannya belum bisa bekerja lagi seperti biasa. Masalah ini juga menjadi perhatian bersama, dan ke depan nanti dicarikan solusinya, tutur Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria akan mencari solusi untuk mengatasi masalah karyawan Holywings yang kehilangan pekerjaan usai 12 outletnya disegel. Penyelesaian tempat hiburan malam itu dilakukan pada Selasa (28/6) karena masalah administrasi perizinan.

"Ini menjadi masalah kita bersama, tentu menjadi perhatian kami," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (29/6).

Wagub DKI Jakarta itu bersyukur dengan banyaknya tempat usaha yang dibangun di Ibu Kota sehingga menghadirkan lapangan pekerjaan. Namun, karena ada kelalaian dan kekurangan masalah izin usaha Holywings yang tidak lengkap maka menimbulkan masalah baru, dan berujung pada pemberhentian karyawan.

"Karyawannya belum bisa bekerja lagi seperti biasa. Masalah ini juga menjadi perhatian bersama, dan ke depan nanti dicarikan solusinya," tutur Riza.

Riza tidak menjelaskan bagaimana solusi yang konkret untuk para karyawan Holywings yang saat ini tidak bisa bekerja. Dia hanya mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang memiliki program-program pengentasan kemiskinan atau mengatasi masalah pengangguran.

"Itu kita memang punya program-programnya ya, yang setiap tahun kita memang upayakan bersama, tentu itu menjadi perhatian kita," kata dia.

Salah satu manajer di Holywings Gunawarman, Dodi Johandi menjelaskan juga dampak yang terjadi usai outletnya disegel Satpol PP.

Menurutnya, salah satu dampaknya terjadi pada karyawannya.

"Kalau dampaknya sih kita punya kurang lebih 3.000 staf. Pasti akan berdampak ekonominya juga," ujar Dodi.

"Dampaknya pasti ke seluruh staf saja sih."

Selain itu, dia juga sudah memberikan informasi kepada para karyawannya terkait dengan tempat usaha bar dan restoran itu sudah disegel.

"Ya kita cuma bisa kasih support saja sih kepada staf, saling menguatkan satu sama lain," katanya.

Meski sudah bergabung dengan Holywings Gunawarman sejak 2018, Dodi heran mengapa penyegelan dilakukan baru sekarang. Dia menduga penyegelan itu disebabkan karena adanya promo minuman keras gratis untuk orang yang bernama Muhammad dan Maria.

"Kurang tahu juga sih. Kemungkinan karena itu juga," ujarnya.

Selain Holywings Gunawarman, ada sebelas outlet lainnya yang juga ikut disegel yakni Holywings di Kelurahan Tanjung Duren Utara, Holy-

wings Kalideres, Holywings di Kepala Gading Barat, Tiger, Dragon, Holywings PIK, Holywings Reserve Senayan,

Holywings Epicentrum, Holywings Mega Kuningan, The Garrison Menteng, dan Vendetta Gatsu. ● yan

FOTO:ANT



PELAYANAN TERDAMPAK PERUBAHAN NAMA JALAN

Sejumlah warga melakukan proses administrasi perubahan nama jalan pada KTP elektronik di Halaman Masjid Al Hikmah Hidayah, Cipuyung, Jakarta Timur, Rabu (29/6). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pelayanan jemput bola di enam wilayah terkait perubahan data administrasi kependudukan imbas pergantian 22 nama jalan menggunakan nama tokoh Betawi.

Sekda Hadiri Rapat Forsesdasi Se-Jawa Barat, Bahas Isu Terkini Pemerintah Daerah

BANDUNG (IM) - Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dedy Supriyadi, menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Kowwil) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Jawa Barat, di GH Universal Hotel, Bandung, Selasa (28/6). Kegiatan yang dihadiri seluruh Sekretaris Daerah se-Jawa Barat tersebut membahas sinergitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Dedy mengatakan, dalam kegiatan itu dirinya beserta seluruh peserta rapat menerima arahan yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi

Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, yakni terkait perkembangan pelayanan publik dan beberapa isu yang sedang terjadi, seperti penyelesaian penanganan pegawai non ASN sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

"Hari ini saya menghadiri pertemuan ini yang membahas perkembangan pelayanan publik bagi seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat, serta beberapa bahasan terkait isu yang saat ini sedang bergulir yaitu pegawai non ASN dan PPPK," katanya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Rabu (29/6).

Sesuai arahan Sekda Jabar, ia menjelaskan lang-

kah awal yang harus dilakukan oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota terkait penanganan pegawai non ASN yaitu melakukan pendataan serta pemetaan jumlah pegawai non ASN yang ada, berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

"Tadi disampaikan arahan Sekda Jabar bahwa awalnya harus dilakukan pemetaan dan kotak jabatan berdasarkan Anjab ABK, walaupun ini untuk tenaga non ASN," jelasnya.

Untuk Pemkab Bekasi sendiri, ia telah melakukan rapat secara intensif bersama perangkat daerah guna merumuskan solusi terbaik. Sementara ini, Pemkab Bekasi sedang dalam proses untuk

FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI



Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi (tiga kanan, bawah) saat menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat di Bandung, Selasa (28/6).

melakukan pendataan pegawai non ASN tersebut, sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Menpan-RB.

"Untuk Pemkab Bekasi, kita akan lakukan rapat intensif dengan BKPSDM, Bappeda, Inspektoral, BPKD, dan Bagian Organisasi untuk kita rumuskan solusinya," tuturnya.

Dari arahan yang diterimanya, seluruh pemerintah daerah diminta untuk dapat menyikapi isu yang ada dengan tenang serta dapat menanganinya dengan memberikan solusi dan penyelesaian terbaik.

"Tadi disampaikan dalam menangani isu tersebut, diharapkan Kabupaten dan Kota bisa menyikapi dengan tenang, melakukan tahapan penanganan dan penyelesaian

dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, saat memberikan arahannya Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan bahwa pendataan dan pemetaan ini penting dilakukan agar masing-masing pemerintah daerah mengingat dan memastikan batasan-batasan yang dimiliki, seperti batasan anggaran dan formasi. Ia ingin pegawai non ASN yang masuk dalam formasi merupakan pegawai yang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan kemampuannya.

"Ingat kita punya batasan terutama anggaran dan formasi. Jika ada kelebihan pegawai non ASN jangan dipaksakan masuk dalam formasi. Ini yang harus dipastikan, oleh karena itu penting sekali pemetaan tadi," pungkasnya. ● mdl

FOTO:ANT



KAMPANYE PENCEGAHAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DI KRL
Petugas KAI Commuter memegang poster saat melakukan kampanye pegah tindak kekerasan dan pelecehan seksual di dalam gerbong KRL, Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (29/6). KAI Commuter mengadakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di transportasi umum, khususnya KRL